

Pansus DPRD Dinilai Mandul

Pontianak, BERKAT.

Kelompok massa tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Pengemban Aspirasi Rakyat menggelar aksi unjuk rasa di DPRD Kalbar, Selasa (4/10). Mereka menuntut aparat penegak hukum menindak lanjuti temuan BPK yang terkesan diabaikan. Mereka turut menilai Pansus DPRD Kalbar yang dibentuk guna memantau Pemprov dalam penyempurnaan temuan dianggap mandul.

"Hasil audit BPK Perwakilan Kalbar, pada anggaran 2010 jumlah kebocoran mencapai Rp 156 miliar. Dengan ditemukan beberapa kejanggalan pada aset dan munculnya anggaran siluman. Jumlah uang yang tidak jelas pengalokasiannya itu sangat besar dan terindikasi dikorupsi," ujar Supito, juru bicara Solmadapar.

Oleh karena itu, massa pengunjuk rasa menyayangkan sikap DPRD Kalbar yang terkesan lemah dan menganggap begitu lunak terhadap Pemprov. Padahal temuan BPK merekomendasikan agar segera dilakukan perbaikan. Walau DPRD telah membentuk pansus untuk masalah tersebut, tapi kinerjanya tidak tampak.

"Maka lebih baik Pansus dibubarkan



Kelompok massa mengatasnamakan diri Solmadapar datang ke DPRD Provinsi Kalbar menggelar aksi unjuk rasa menuntut aparat penegak hukum menindaklanjuti temuan BPK.

FOTO DELI

saja. Pansus Mandul," kata Supito.

Karena itu, dalam orasinya Solmadapar menginginkan aparat penegak hukum turun tangan menindaklanjuti hasil temuan

audit BPK. Supaya alokasi keuangan negara kedepan tidak dipersalahkan. Melainkan sepenuhnya diperuntukkan bagi kepentingan rakyat.

Dalam hal ini, peran Ketua DPRD ikut dipertanyakan. Guna menyikapi temuan BPK di sejumlah SKPD Pemprov Kalbar. Maka desakan mundur turut dilontarkan massa pengunjuk rasa jika tidak mampu menyelesaikan permasalahan temuan audit BPK. Termasuk kepada seluruh anggota DPRD yang lagi menjabat.

"Tim Pansus DPRD Provinsi dan aparat penegak hukum harus segera mengambil langkah. Jangan hanya makan gaji buta dan menunggu perintah. Pemprov juga harus segera menindaklanjuti hasil audit BPK secara objektif dan profesional. Kami minta Gubernur mengambil sikap tegas bila jajarannya terbukti terlibat dalam penyalahgunaan anggaran," papar Supito.

Aksi unjuk rasa massa di Gedung DPRD Kalbar mendapat pengawalan ketat aparat keamanan. Sejak bergerak dari bundaran Digulis Universitas Tanjungpura hingga tiba ke lokasi. Ketika itu, Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya sedang menggelar rapat bersama legislatif di gedung DPRD. Kendati demikian tidak ada seorang pun yang menerima pengunjukrasa. Hingga akhirnya mereka membubarkan diri secara tertib. (del)